

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Syafiie (2006: 105), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Harbani (2008:16) mengemukakan bahwa ketika pemerintah mengambil keputusan, harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, sehingga bukan sekedar pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah.

Menurut Winarno (2007:17), kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang bagi kebijakan yang diusulkan untuk digunakan dan diatasi untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Suharto (2005:7), kebijakan adalah ketentuan yang memuat prinsip-prinsip penggerakkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Wahab (2008:32) mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/dasar. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7, hierarkinya adalah 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) UUD/Peraturan

Pemerintah sebagai pengganti UU; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; 5) Peraturan Daerah.

2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau penjas dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan lain-lain.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Bentuk kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Menurut Winarno (2002:17), kebijakan publik adalah hipotesis yang berisi kondisi awal dan konsekuensi yang dapat diprediksi. Kebijakan publik harus dibedakan dari bentuk kebijakan lainnya, seperti kebijakan privasi. Keterlibatan faktor non pemerintah mempengaruhi hal tersebut.

Leo (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak orang beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami karena yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Tangkilisan (2003:2) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah beberapa kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuan agar kebijakan publik bermanfaat untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat diperlukan karena tugas pemerintah adalah melayani.

### **2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan**

Menurut Suharno (2010:52), proses pembuatan kebijakan itu rumit dan kompleks serta tidak semudah yang dibayangkan. Namun demikian, pengurus suatu organisasi atau lembaga kelembagaan dituntut untuk memiliki tanggung jawab dan kemauan serta kemampuan atau keahlian untuk membuat kebijakan dengan risiko yang diharapkan.

Beberapa faktor mempengaruhi pembuatan kebijakan. Hal penting yang harus diwaspadai dan kemudian dapat diantisipasi adalah sering terjadi kesalahan umum dalam pengambilan kebijakan. Menurut Suharno (2010:53), faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1. Adanya Pengaruh Tekanan dari Luar

Tak jarang, pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan karena adanya tekanan dari luar.

2. Adanya Pengaruh dari Kelompok Luar

Lingkungan sosial pembuat keputusan/kebijakan juga memainkan peran besar.

### 3. Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama

Kebiasaan organisasi lama seperti kebiasaan penanaman modal yang belum profesional dan terkadang sangat birokratis, cenderung diikuti oleh kebiasaan tersebut oleh pengurus, padahal keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik karena salah dan perlu dilakukan. Kebiasaan lama ini seringkali layak untuk diikuti, terutama jika kebijakan yang ada sudah memuaskan.

### 4. Adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh pengambil keputusan/kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristiknya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam menentukan keputusan/kebijakan.

## **2.1.3 Jenis Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2010:24), menyampaikan kategori kebijakan publik adalah sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Substantif versus Kebijakan Prosedural

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebaliknya, kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif dapat diimplementasikan.

#### 2. Kebijakan Barang Umum dan Barang Privat

Kebijakan barang publik adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa publik. Sedangkan kebijakan barang privat adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau jasa untuk pasar bebas.

### 3. Kebijakan Distributif versus Kebijakan Regulatori

Kebijakan distributif menyangkut distribusi layanan atau manfaat kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulasi adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau larangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.

### 4. Kebijakan Material versus Kebijakan Simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan manfaat sumber daya yang kompleks kepada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis kepada kelompok sasaran.

#### **2.1.4 Urgensi Kebijakan Publik**

Suharno (2010: 19) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau mendesak untuk dikaji, yaitu:

##### 1. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-usulnya, proses perkembangannya, dan konsekuensinya bagi masyarakat.

##### 2. Alasan Profesional

Kajian kebijakan publik dimaksudkan untuk membangun pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik untuk memecahkan masalah sosial sehari-hari.

### 3. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik dimaksudkan untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang tepat.

#### **2.1.5 Karakteristik Kebijakan Publik**

Menurut Leo (2008:8), ada beberapa ciri utama definisi kebijakan publik:

1. Secara umum, kebijakan publik berkaitan dengan tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu daripada mengubah atau perilaku acak.
2. Kebijakan publik memuat bagian-bagian atau pola-pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan-keputusan yang terpisah. Misalnya, suatu kebijakan mencakup keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu dan keputusan selanjutnya yang terkait dengan implementasi dan implementasinya.
3. Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang hendak dilakukan atau apa yang akan dilakukan. Jika legislatif mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pengusaha untuk membayar tidak kurang dari upah minimum, tidak ada yang dilakukan untuk menerapkan undang-undang tersebut. Akibatnya tidak terjadi perubahan perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini adalah pengupahan yang tidak diatur oleh undang-undang. Artinya kebijakan publik juga memperhatikan apa yang akan terjadi setelah kebijakan tersebut diimplementasikan.

4. Kebijakan publik bisa positif atau negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu masalah; negatif, kebijakan publik dapat melibatkan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan atau tidak melakukan apa-apa, meskipun keterlibatan pemerintah diperlukan untuk konteks itu.
5. Kebijakan publik setidak-tidaknya bersifat positif berdasarkan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

### **2.1.6 Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dipelajari oleh para pelaku pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa pakar politik yang tertarik mempelajari kebijakan publik membagi proses pembuatan kebijakan publik menjadi beberapa tahapan. Tujuan dari distribusi semacam ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik (Winarno, 2007:32).

Menurut Dunn (2000:12), tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Beberapa aktor dipilih dan ditunjuk untuk merumuskan isu-isu dalam agenda publik. Sebelumnya, masalah-masalah tersebut berlomba-lomba untuk masuk dalam agenda kebijakan karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Para aktor pembuat kebijakan kemudian mendiskusikan isu-isu yang telah masuk dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah ini kemudian

didefinisikan untuk menemukan solusi terbaik untuk memecahkan masalah. Pemecahan masalah ini datang dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan.

### 3. Tahap Adopsi Kebijakan

Para pembuat kebijakan menawarkan berbagai macam alternatif kebijakan. Pada akhirnya, salah satu alternatif kebijakan diambil untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

### 4. Tahap Implementasi Kebijakan

Sebuah program kebijakan hanya akan menjadi catatan para elite jika program tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus dilaksanakan, yaitu dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat yang lebih rendah.

### 5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang diterapkan akan dinilai atau dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut telah mampu menyelesaikan masalah. Kebijakan publik dibuat untuk mencapai dampak yang diinginkan.

### **2.1.7 Kerangka Kerja Kebijakan Publik**

Menurut Suharno (2010:31), kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh variabel-variabel berikut, yaitu:

1. Tujuan yang ingin dicapai. Termasuk kompleksitas tujuan yang ingin dicapai. Semakin kompleks tujuan kebijakan, semakin sulit untuk mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, semakin sederhana tujuan kebijakan, semakin mudah untuk mencapainya.
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai nilai akan jauh lebih sulit dicapai daripada kebijakan yang hanya mengejar satu nilai saja.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh keuangan, material dan sumber daya infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh aktor kebijakan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Kualitas ditentukan oleh pendidikan, kompetensi di bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moral.
5. Lingkungan, yang meliputi sosial, ekonomi, dan politik. Kinerja suatu kebijakan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi dan politik di mana kebijakan tersebut diimplementasikan.

### **2.1.8 Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan adalah kegiatan intelektual praktis untuk menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan (Dunn, 1998:44). Menurut Tangkilisan (2003:1), analisis kebijakan menentukan alternatif kebijakan yang dapat memberikan jalan keluar dari berbagai alternatif kebijakan.

Menurut Winarno (2005:27), analisis kebijakan berkaitan dengan menyelidiki dan mendeskripsikan sebab dan akibat dari kebijakan. Ada tiga hal pokok dalam menganalisis kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Fokus utama adalah pada penjelasan/rekomendasi kebijakan yang tepat.
2. Penyebab dan akibat dari kebijakan diselidiki dengan menggunakan metodologi ilmiah.
3. Analisis dilakukan untuk mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan untuk kebijakan dan pembentukannya. Sehingga dapat diterapkan pada berbagai institusi dan bidang kebijakan.

Analisis kebijakan adalah kegiatan yang menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dikemukakan oleh Dunn (1998:25), yang mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan analisis kebijakan, antara lain:

1. Perumusan Masalah Kebijakan

Perumusan masalah kebijakan dapat memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempertanyakan asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui

penetapan agenda. Rumusan masalah kebijakan terdiri dari beberapa indikator, antara lain:

- a. Analisis batas memperkirakan apakah sistem perumusan masalah individu yang kita sebut masalah meta relatif lengkap.
- b. Analisis klasifikasi adalah teknik untuk memperjelas konsep yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan kondisi masalah.
- c. Analisis hierarki adalah teknik untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab suatu masalah

## 2. Peramalan Kebijakan

Peramalan kebijakan memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa depan sebagai akibat dari pengambilan alternatif. Peramalan kebijakan terdiri dari beberapa indikator, antara lain:

- a. Proyeksi adalah prediksi berdasarkan tren masa lalu dan sekarang ke masa depan dan dapat diperkuat oleh pendapat otoritas.
- b. Prediksi adalah ramalan berdasarkan asumsi teoritis perusahaan.
- c. Prakiraan adalah prakiraan berdasarkan penilaian informasi atau penilaian ahli tentang situasi masa depan masyarakat.

## 3. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang konsekuensi masa depannya telah diimplementasikan melalui peramalan.

Rekomendasi kebijakan terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

- a. Pengambilan keputusan tunggal, yaitu pilihan yang harus dibuat oleh hanya satu orang, dapat mempengaruhi banyak orang.
- b. Kepastian, yaitu hasil pilihan yang harus diketahui dengan pasti.
- c. Kecepatan, yaitu hasil dari tindakan, harus segera terjadi.

#### 4. Pemantauan Kebijakan

Monitoring kebijakan, yaitu memberikan pengetahuan yang diambil dari kebijakan sebelumnya. Pemantauan kebijakan terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

- a. Kepatuhan, yaitu untuk menentukan apakah tindakan aparatur sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh pembuat undang-undang.
- b. Pemeriksaan membantu menentukan apakah sumber daya dan layanan ditujukan untuk kelompok sasaran.
- c. Akuntansi, pemantauan menghasilkan informasi yang berguna untuk menghitung perubahan sosial dan ekonomi.
- d. Explanation, yaitu monitoring, juga mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil kebijakan publik berbeda.

#### 5. Penilaian Kebijakan

Penilaian kebijakan menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang perbedaan antara kinerja kebijakan yang diharapkan dan hasil aktual. Penilaian kebijakan terdiri dari beberapa indikator, antara lain:

- a. Evaluasi semu, yaitu menghasilkan informasi yang valid dan reliabel mengenai hasil kebijakan.
- b. Evaluasi formal menghasilkan informasi yang valid dan dapat diandalkan tentang hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil ini berdasarkan program kebijakan.

### **2.1.9 Evaluasi Kebijakan Publik**

Sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan pemerintah harus dievaluasi. Evaluasi dilakukan karena tidak semua kebijakan publik dapat memperoleh hasil atau dampak yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Menurut Winarno (2007:226), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang melibatkan estimasi atau penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai aktivitas fungsional. Artinya evaluasi kebijakan dilakukan pada tahap akhir dan dilakukan sepanjang seluruh proses kebijakan.

Menurut Wibowo (1994:10), evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk menentukan empat aspek: aspek proses pembuatan kebijakan, aspek proses implementasi, aspek konsekuensi kebijakan, dan aspek efektivitas dampak kebijakan. Keempat aspek pengamatan tersebut dapat mendorong seorang evaluator untuk mengevaluasi isi kebijakan secara spesifik, baik dalam dimensi hukum maupun terutama logika dalam mencapai tujuan dan konteks kebijakan. Kondisi lingkungan ini mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan.

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

### **2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Secara etimologis, konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam Kamus Besar Webster, implementasi berarti memberikan pelaksanaan dan memberikan efek praktis pada sesuatu (Wahab, 2008:64). Implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:101).

Implementasi kebijakan merupakan proses yang diperlukan karena seberapa baik suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik untuk implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan dari kebijakan publik tidak akan terwujud. Demikian pula sebaliknya, sebaik apapun persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakan tersebut tidak dirumuskan dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik (Edward III, 1980).

Ada dua pilihan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, yaitu mengimplementasikannya secara langsung dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158).

### **2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut Charles O Jones (1996), implementasi adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan untuk melaksanakan suatu program yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek tertentu. Implementasi kebijakan terdiri dari tiga kegiatan: sangat penting, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan.

#### **1. Organisasi**

Organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. Kegiatan pengorganisasian adalah upaya untuk menentukan dan menata kembali sumber daya, unit, dan metode yang mengarah pada upaya mewujudkan atau mewujudkan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan maksud dan tujuan dalam kebijakan.

Organisasi hingga implementasi kebijakan dapat terkait dengan determinan unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi di bidang sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana.

#### **2. Interpretasi**

Menafsirkan adalah bahasa kebijakan ke dalam rencana dan arah yang tepat yang dapat diterima dan diimplementasikan. Kegiatan interpretasi merupakan kegiatan untuk menjelaskan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang fungsional dan mudah dipahami sehingga substansi kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan.

Senada dengan pemikiran tersebut, Abidin (2002:199) juga menggambarkan sistem mental (perilaku) kebijakan yang berkaitan dengan pemahaman pelaksanaan dan tujuan kebijakan yang pada akhirnya dapat menerima atau menolak kebijakan tersebut. Pengaruh faktor psikologis dalam implementasi kebijakan menjadi signifikan, bahkan lebih penting dari substansi itu sendiri.

Pemahaman publik tidak terletak pada isi kebijakan juga pada pendekatan, metode penyampaian, dan implementasi suatu kebijakan. Interpretasi tentang keberhasilan implementasi kebijakan membawa pemahaman yang mendalam tentang maksud dan tujuan kebijakan sehingga dapat memberikan dukungan dengan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pada kebijakan tersebut.

### 3. Penerapan

Implementasinya adalah pemberian layanan, pembayaran, atau lainnya secara rutin yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Senada dengan itu, Abidin (2002:199) juga mengemukakan keberhasilan implementasi kebijakan dari pendekatan prosedural berupa langkah-langkah yang diambil dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Hal yang esensial dalam implementasi adalah kepentingan dan prioritas menurut waktu, dimulai dari memikirkan aplikasi program. Penerapannya berkaitan erat dengan prosedur kebijakan dan prosedur kerja, biasanya dalam petunjuk pelaksanaan kebijakan.

## **2.3 Pengelolaan Sampah**

### **2.3.1 Pengertian Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, sampah tetap berupa benda padat yang berasal dari kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam. Sampah tidak digunakan atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006).

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang begitu saja, merupakan hasil kegiatan manusia dan alam yang sudah tidak terpakai lagi karena telah diambil unsur atau fungsi utamanya. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan limbah atau sampah. Sumber sampah dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, dan pasar (Sejati, 2009).

### **2.3.2 Jenis-Jenis Sampah**

Menurut Sucipto (2012), jenis sampah berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### **1. Sampah Organik**

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik sendiri terbagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah adalah sampah dengan kadar air yang cukup tinggi, seperti kulit buah dan sisa sayuran. Sedangkan sampah organik kering meliputi bahan lain yang kadar airnya kecil, seperti kertas, ranting kayu atau pohon dan daun-daun kering.

## 2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Limbah ini berasal dari bahan terbarukan dan bahan berbahaya dan beracun. Jenis yang termasuk dalam kategori daur ulang antara lain bahan yang terbuat dari plastik atau logam. Sampah kering nonlogam meliputi gelas kaca, botol kaca, kain, kayu—sampah lunak seperti debu dan abu.

### 2.3.3 Sumber Sampah

Menurut Chandra (2006), sumber timbulan sampah adalah:

#### 1. Sampah dari Pemukiman Penduduk

Di sebuah pemukiman, sampah biasanya dihasilkan oleh sebuah keluarga yang tinggal di sebuah gedung atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan dan sampah yang basah, kering, abu plastik dan lain-lain.

#### 2. Sampah dari Tempat-Tempat Umum dan Perdagangan

Tempat umum adalah tempat di mana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas. Tempat-tempat tersebut memiliki potensi yang cukup besar dalam menghasilkan sampah, termasuk tempat perdagangan seperti toko dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, kaleng dan sampah lainnya.

### 3. Sampah dari Sarana Pelayanan Masyarakat Milik Pemerintah

Sampah yang dimaksud di sini adalah tempat hiburan umum, pesta, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan fasilitas pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

### 4. Sampah dari Industri

Dalam pengertian ini, termasuk pabrik sumber daya alam, perusahaan kayu dan kegiatan industri lainnya, termasuk distribusi atau pengolahan bahan mentah. Limbah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya berupa limbah basah, limbah abu kering, sisa makanan, sisa bahan bangunan.

### 5. Sampah Pertanian

Sampah dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan atau hewan di daerah pertanian, seperti sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan dalam makanan, pupuk atau pengusir serangga tanaman.

## **2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah**

Menurut Chandra (2006), beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sampah adalah:

### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk tergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk maka semakin banyak pula sampah yang menumpuk karena semakin sedikit ruang atau ruang untuk menampung sampah. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

2. Sistem Pengumpulan atau Pembuangan Sampah yang dipakai

Pengumpulan sampah menggunakan gerobak lebih lambat dibandingkan truk.

3. Pengambilan Bahan dalam Sampah untuk digunakan Kembali

Cara ini dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi golongan tertentu. Keadaan mempengaruhi frekuensi pengumpulan. Jika harganya tinggi, sampah yang tersisa sedikit.

4. Faktor Geografis

Lokasi pembuangan berada di daerah pegunungan, pesisir, atau dataran rendah.

5. Faktor Waktu

Jumlah sampah per hari bervariasi dengan waktu. Misalnya, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak daripada jumlah di pagi hari, sedangkan jumlah sampah di pedesaan kurang bergantung pada faktor waktu.

6. Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya

Contoh, adat istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat.

7. Faktor Musim

Pada musim hujan, sampah bisa tersangkut di selokan pintu air atau filter air limbah.

8. Kebiasaan Masyarakat

Misalnya, jika seseorang suka mengonsumsi satu jenis makanan atau tumbuhan, maka sisa makanan akan bertambah.

#### 9. Kemajuan Teknologi

Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. Contohnya adalah plastik, kardus, AC, TV, dan kulkas.

#### 10. Jenis Sampah

Semakin maju tingkat budaya suatu masyarakat, semakin kompleks pula jenis sampahnya.

### **2.3.5 Dampak Sampah**

Menurut Chandra (2006), pengelolaan sampah yang buruk dapat merugikan kesehatan dan lingkungan, antara lain sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Kesehatan
  - a. Menjadikan sampah sebagai tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus.
  - b. Angka Demam Berdarah Dengue (DBD) akan meningkat karena vektor penyakit hidup dan berkembang biak di tempat sampah atau ban bekas yang diisi air hujan.
  - c. Kecelakaan terjadi akibat pembuangan sampah sembarangan seperti luka akibat benda tajam seperti besi dan kaca.
  - d. Gangguan atau penyakit psikosomatis yang melibatkan pikiran dan tubuh, dimana pikiran mempengaruhi tubuh hingga penyakit tersebut muncul dan semakin parah, seperti sesak napas, insomnia, dan stres.
2. Dampak terhadap Lingkungan
  - a. Estetika lingkungan menjadi kurang enak dipandang.

- b. Proses penguraian sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau tidak sedap.
- c. Pembakaran sampah dapat menyebabkan pencemaran udara dan bahaya kebakaran yang lebih luas.
- d. Pembuangan sampah ke saluran pembuangan akan menyebabkan aliran air terganggu dan saluran air menjadi dangkal.
- e. Ketika musim hujan tiba, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan menyebabkan pencemaran sumber air permukaan atau sumur dangkal.
- f. Air banjir dapat menyebabkan kerusakan fasilitas masyarakat seperti jalan, jembatan, dan saluran air.

#### **2.4 Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar peneliti dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Lina Nurlina (2021), dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pelayanan persampahan Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan efektif. Masih kurangnya komunikasi dengan kelompok sasaran kebijakan, kemampuan, kompetensi dan konsistensi pelaksana yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya kelompok sasaran tradisional, sehingga sulit untuk memahami pengelolaan sampah, belum mendukung

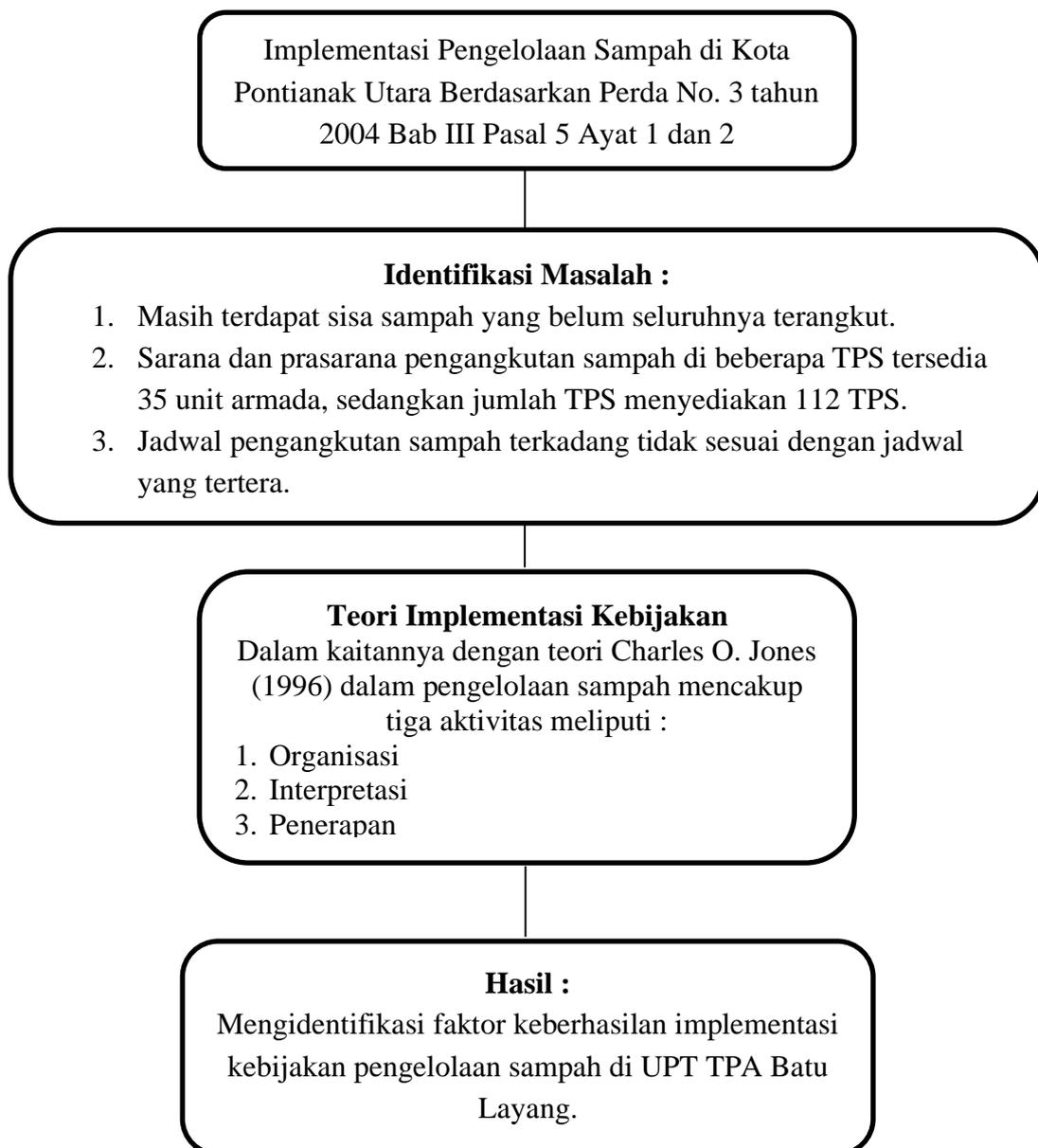
pencapaian tujuan kebijakan. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian Nurlina (2021) berlokasi di Kabupaten Bandung sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Kota Pontianak.

2. Tri Yudianto (2021), dengan judul Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yang dilakukan mulai dari pemungutan retribusi, sumber timbulan sampah, penyimpanan, tempat pengumpulan (TPS), pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir (TPS). Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian Yudianto (2021) berlokasi di Kabupaten Blora sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Kota Pontianak.
3. Dedeng Yusuf Maolani (2015), dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga terkadang berjalan dengan baik, terkadang tidak efektif. Hal ini dikarenakan seringnya intervensi dari pemerintah dan pengelolaan sampah yang tidak terintegrasi. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian Maolani (2015) berlokasi di Kabupaten Dili sedangkan penelitian saat ini berlokasi di Kota Pontianak.

## 2.5 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian**



## **2.6 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan kajian teoritis dan alur pemikiran penelitian yang telah diuraikan di atas, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini:

1. Apakah struktur organisasi yang terbentuk telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan fungsinya?
2. Apakah interpretasi yang dilakukan dalam pengelolaan sampah mampu meminimalkan volume sampah?
3. Apakah penerapan kebijakan pengelolaan sampah telah dilaksanakan sesuai aturan dan standar yang berlaku?